

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022**



**KANTOR KESATUAN BANGSA
KOTA YOGYAKARTA
2017**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan perlunya Rencana Strategis (Renstra) di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Undang-undang ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini. Dokumen Renstra disusun guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada kegiatan yang sifatnya spesifikasi yang bersinergi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Perangkat Daerah (PD) Kantor Kesatuan Bangsa Tahun 2017 merupakan dokumen lima tahunan Perangkat Daerah (PD) yang dijadikan pedoman yang terukur beserta ketentuan pagu anggarannya bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah (PD) maupun yang ditempuh dengan mendorong peran serta masyarakat.

Seiring dengan pelaksanaan Renstra 5 (lima) tahun sebelumnya yang diakomodir dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, maka untuk Rencana Strategis Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki arah dan tujuan yang sesuai dengan misi, visi dan kebijakan Walikota yang baru terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta yang juga merupakan manifestasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Yogyakarta. Disisi lain Dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini merupakan turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta yang secara langsung merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan memperhatikan issue Strategis kota serta rumusan permasalahannya.

Dokumen Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta merupakan dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Tahunan dalam 5 (lima) tahun kedepan, sehingga Kantor Kesatuan Bangsa memiliki arah dan tujuan yang sesuai dengan arah Kebijakan Walikota. Dengan berpedoman

pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah (PD) dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah (PD) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang ditandatangani Walikota Yogyakarta. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 9) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- 11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029
- 12) Peraturan Daerah Nomor Tahun 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- 14) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2009.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Tahun 2017 s/d 2022 ini yaitu :

- 1) Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta.
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa yang memuat program dan kegiatan.
- 3) Meningkatkan kualitas dan efektifitas upaya pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan Wawasan kebangsaan dan Politik Dalam Negeri

- 4) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (PD) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika Renstra Perangkat Daerah (PD) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renstra tahun 2017-2022 ini Perangkat Daerah (PD) Kantor Kesatuan Bangsa memiliki permasalahan yang cukup pelik berkaitan dengan tugas, fungsi dan struktur organisasinya. Berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri akan ditarik menjadi urusan pemerintah pusat. Namun sampai batas waktu berlakunya UU ini yaitu di tahun 2016 belum juga turun Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut. Peraturan Pemerintah baru turun di pertengahan tahun 2016 yaitu PP 18 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah (PD) yang mengampu urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dibiarkan seperti sebelumnya dan masih menjadi kewenangan pemerintah daerah. Itulah yang menjadikan Kantor Kesatuan Bangsa menjadi satu-satunya Perangkat Daerah (PD) yang berbentuk kantor dengan struktur yang sangat minimalis karena urusan Pemuda dan Olahraga telah berdiri menjadi Perangkat Daerah (PD) tersendiri. Senyampang itu aturan daerah yang mengatur Kantor Kesatuan Bangsa juga tidak diubah dan masih dipergunakan meskipun urusan Pemuda dan Olahraga telah dihapus.

2.1.1 Tugas

- a. Merumuskan dan merencanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa;
- b. Melaksanakan pembinaan di bidang kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kesatuan bangsa;
- e. Melaksanakan ketatausahaan kantor.

2.1.2 Fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang kesatuan kebangsaan dan politik dalam negeri.

2.1.3 Struktur Organisasi

- a. Kantor Kesatuan Bangsa adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang kesatuan bangsa.
- b. Kantor Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Kantor sebagaimana dimaksud butir 2 diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara skematis untuk Struktur Organisasi kantor Kesatuan Bangsa sebagaimana dituangkan dalam skema sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kesatuan Bangsa adalah 11 orang, terdiri dari : 10 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang Tenaga Bantuan (Naban). Kondisi eksisting pegawai yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa adalah : 1 orang Tenaga Bantuan (Naban), 2 orang diperbantukan di KPU, dan 8 orang berada di Kantor Kesatuan Bangsa.

Pegawai menurut Status, Pangkat dan Golongan sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor : Pembina Tk. I, Gol. IV/a : 1 orang
- b. Kepala Sub Bag : Pembina TK I, Gol. IV/a : 1 orang
- c. Kepala Seksi : Penata TK I, Gol. III/d : 1 orang
- d. Staf : Pembina Tk. I, Gol. IV/a : 1 orang
Penata Tk. I, Gol. III/d : 1 orang
Penata Muda Tk. I, Gol. III/b : 3 orang
Pengatur Tk. I, Gol. II/d : 2 orang

2.2.2. Perlengkapan

Asset perlengkapan yang dikelola oleh Kantor Kesatuan Bangsa berupa sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya
Per 31 Desember 2016

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	RUSAK	RUSAK SEKALI	
1.	Meja Kerja	30	-	-	30
2.	Meja Rapat	11	-	-	11
3.	Sice/Meja Tamu	2	-	-	2
4.	Kursi Komputer	14	-	-	14
5.	Filling Cabinet	16	-	-	16
6.	Almari Besi	7	-	-	7
7.	Jam Dinding	5	-	-	5
8.	Almari Kayu	7	-	-	7
9.	Kalkulator	3	-	-	3

10.	Brand Cash	2	1	-	3
11.	Komputer	9	1	-	10
12.	Printer	6	-	-	6
13.	Mesin Ketik	4	-	-	4
14.	Laptop	1	-	-	1
15.	Kursi Kerja Kayu	29	-	-	29
16.	Kursi lipat	81	-	-	81
17.	Kamera Digital	1	-	-	1
18.	Kamera	2	-	-	2
19.	Mesin Fax	1	-	-	1
20.	Pesawat telepon	3	-	-	3
21.	LCD Display	1	-	-	1
22.	Air Conditioner (AC)	3	-	-	3
23.	Radio	3	1	-	4
24.	White board	2	-	-	2
25.	Dos Note	1	1	-	2
26.	Meja Rapat	11	-	-	11
27.	Wireles	2	-	-	2
28.	Microphone	1	-	-	1
29.	Alat pemadam	1	-	-	1
30.	Kipas Angin	1	1	-	2
31.	Rak Kayu	6	-	-	6
32.	Alat penghisap Debu	1	-	-	1
33.	Megaphone	1	-	-	1
34.	Mobil	2	-	-	2
35.	Sepeda Motor	2	-	-	2
36.	Sepeda	1	-	-	1
37.	Tustel	1	-	-	1
38.	TV Berwarna	1	-	-	1
39.	Rak Besi	1	-	-	1

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kapasitasnya Perangkat Daerah (PD) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, telah dirumuskan beberapa indikator-indikator dengan hasil-hasil sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Yogyakarta

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Menurunnya Tingkat Intensitas dan Frekuensi Konflik Sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial		Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP		42,03%	37,03%	32,03%	27,03%	22,03%	42,03%	37,03 %	32,03 %	25,75%	21,02%	100%	100%	100%	104%	100,05%
2.	Meningkatnya Peran serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda		Gelanggang / Balai Remaja (Selain Milik Swasta)		69,74%	73 %	77 %	81 %	85 %	69,74%	73 %	77 %	84,04 %	85%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Prestasi Olahraga		Lapangan Olah Raga		89,50%	91,50%	93,50%	95,50%	97,50%	89,50%	91,50 %	93,50 %	97,05 %	97,05 %	100%	100%	100%	100%	100%

Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa periode 2012 – 2016 dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dimana tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelayanannya. Hal ini sangat didukung oleh berbagai hal seperti :

1. Sinergitas yang berhasil dijalin dengan baik oleh Kantor Kesatuan Bangsa dengan berbagai pihak baik mitra maupun stake holder sehingga dukungan mereka untuk mensukseskan setiap program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dapat terlihat.
2. Kondisifitas Kota Yogyakarta yang dapat terjaga dengan baik karena sinergitas dengan berbagai pihak dan forum yang ada dalam mengendalikan konflik sosial yang terjadi di Kota Yogyakarta

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa
Kota Yogyakarta

Uraian ***)	Anggaran (Rp) pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	336.159.960	397.782.708	223.248.000	225.251.105	289.942.052	319.444.210	273.222.336	190.021.451	212.303.254	261.181.185,28	95,03	68,69	87,80	94,25	90,08	-1 %	-1%
Peningkatan sarana dan Aparatur	27.478.450	80.767.000	41.692.000	64.889.200	50.784.000	23.424.150	69.431.170	25.552.012	47.199.406	37.954.843	87,68	85,96	61,29	72,74	66,14	6%	-6%
Peningk.Pengemb.Sistem Pelap. Capaian Kinerja dan keuangan	1.470.000	8.340.000	8.360.000	8.360.000	8.000.000	1.470.000	8.340.000	7.650.000	8.360.000	7.800.000	100	100	91,51	100	97,50	20%	-1%
Pembinaan & Pengemb. Generasi Muda	171.521.000	219.883.500	436.871.900	456.483.406	1.276.242.561	161.456.000	201.668.500	293.462.635	435.229.599	1.149.235.774	94,13	91,72	67,17	95,34	90,05	35%	-1%
Pengemb. Wasbang	150.855.000	510.461.000	391.278.000	436.060.500	516.840.000	150.855.000	218.008.500	233.071.765	386.612.485	468.639.482	81,61	42,71	59,57	88,66	90,67	18%	4%
Fasilitas Olah Raga	1.482.615.000	1.787.811.000	1.300.260.000	1.542.032.000	2.897.390.000	1.469.646.000	1.703.785.000	1.113.630.580	1.474.565.900	2.773.179.100	99,13	95,30	85,65	95,62	95,71	13%	-1%

Rasio antara dan anggaran dan realisasi yang berjalan di 5 tahun tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terjadi pencapaian yang tidak maksimal di program kegiatan teknis. Namun secara keseluruhan pencapaiannya cukup baik kecuali untuk program pelayanan administrasi perkantoran karena sifatnya adalah penyiapan untuk hal-hal yang terjadi di tahun anggaran berjalan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Analisis Internal dan Eksternal

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah (PD), adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Kekuatan
 - a) Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
 - b) Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta.
 - c) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Kantor Kesatuan Bangsa untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
 - d) Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
 - e) Adanya sarana dan prasarana
- 2) Kelemahan
 - a) Tidak optimalnya kelembagaan yang ada dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sehingga saat ini kondisi kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa tidak sesuai antara Perda dan Perwal yang mengatur dengan kondisi eksisting
 - b) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas
 - c) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah (PD)
 - d) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
 - e) Data yang ada kurang lengkap

b. Faktor Eksternal

- 1) Peluang
 - a) Stabilitas daerah yang cukup kondusif.
 - b) Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi
 - c) Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat

- d) Kesiediaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dengan swadana
 - e) Tersedianya pedoman untuk acuan
- 2) Ancaman
- a) Adanya potensi terjadinya konflik.
 - b) Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi.

2.4.2. Faktor-faktor kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen bersama untuk menjaga situasi Yogyakarta tetap kondusif.
- b. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
- d. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal.
- e. Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- f. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertical maupun horizontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.
- g. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kota Yogyakarta identik dengan kota pendidikan, budaya dan pariwisata dimana banyak orang yang datang dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu maupun berwisata di Kota Yogyakarta. Hal ini menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota yang sangat terbuka menerima pengaruh dari luar baik yang bersifat budaya maupun ideologi. Tentu saja ini bisa dipandang sebagai potensi namun tak jarang juga menimbulkan permasalahan baik yang bersifat horisontal maupun vertikal. Keterbukaan informasi yang saat ini sedang melanda negeri ini menjadikan kita semua harus selalu waspada terhadap pengaruh-pengaruh yang sekiranya berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Penguatan karakter dan jati diri menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk mempertahankan NKRI dari gangguan yang bersifat laten maupun nyata yang berasal dari dalam maupun luar. Inilah yang menjadi titik perhatian Pemerintah termasuk Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mempertimbangkan heterogenitas yang ada di kota ini.

Seiring sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah kota Yogyakarta melalui Kantor Kesatuan Bangsa dengan mendasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2009, maka Kantor kesatuan Bangsa mempunyai fungsi pelaksanaan sebagai kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa, generasi muda dan olah raga. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang diampu oleh Kantor Kesatuan Bangsa tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sementara urusan kepemudaan dan keolahragaan dipecah dan berdiri sebagai Perangkat Daerah (PD) sendiri yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga. Pada tahun 2017 inilah keberadaan Kantor Kesatuan Bangsa hanya mengurus masalah kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meskipun secara aturan di tingkat lokal masih mengacu dengan peraturan yang lama. Permasalahan kelembagaan ini menjadi sangat penting karena struktur inilah yang mengakibatkan tidak maksimalnya peran Kantor Kesatuan Bangsa serta tugas pokok fungsi yang seharusnya diembannya. Jika kita mendasarkan pada Perda nomor 9 tahun 2008 yang kemudian dikuatkan dengan Perwal 65/2008 yang disempurnakan dengan Perwal 117/2009, maka seharusnya struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa

terdiri dari 1 kepala kantor, 1 ka sub bag tata usaha, dan 3 orang kepala seksi. Namun dengan terbentuknya PD baru maka seksi pemuda dan seksi olahraga lebur di Dinas Pemuda dan Olah Raga. Meskipun demikian kotak seksi yang kosong harusnya tetap dipertahankan keberadaannya namun digantikan dengan seksi yang berhubungan dengan kesatuan bangsa sehingga struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa tetap terdiri dari 3 seksi sesuai dengan peraturan yang ada.



Sebenarnya kementerian Dalam Negeri RI telah memberikan arahan berkaitan dengan struktur kelembagaan yang lazim di institusi yang mengurus urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Diharapkan dengan adanya permasalahan kelembagaan ini bisa teratasi dengan dua pilihan yaitu pertama mengisi kotak jabatan kosong dengan jabatan yang berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri atau mengusulkan kepala Menteri Dalam Negeri untuk menaikkan status Kantor Kesatuan Bangsa menjadi Badan Kesatuan Bangsa mengingat di PP 18 tahun 2016 tidak didapati Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Kantor.

Dengan dasar hal-hal tersebut maka Kantor Kesatuan Bangsa terdiri dari Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa dengan ditunjang oleh Sub Bag Tata Usaha sebagai Sekretariat Perangkat Daerah (PD). Adapun permasalahan-permasalahan yang dijumpai Kantor Kesatuan Bangsa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

No	PROGRAM/ KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Masih adanya potensi konflik sosial yang terjadi di Kota Yogyakarta	Dilaksanakan kegiatan yang meningkatkan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, penguatan forum dan pemantapan kondisi sosial politik di wilayah
1.1.	Peningkatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan sebagai upaya pengendali konflik sosial	Diperbanyak pelaksanaan forum pemantapan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi PNS, Tokoh Masyarakat, Ormas / LSM serta penguatan forum pengendali konflik sosial di wilayah
1.2.	Pemantapan Politik Dalam negeri dan Organisasi kemasyarakatan	Masih belum optimal kondusifitas sosial politik yang ada di masyarakat	Pemantapan dan Monitoring kegiatan sosial politik di Kota Yogyakarta ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya
1.3.	Pemantapan Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi	Perlu adanya ketahanan nasional di semua bidang yang sesuai dengan standart	Penguatan forum-forum yang ada di Kota Yogyakarta

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 , Visi Kota Yogyakarta adalah ***“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas Pariwisata berbasis budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”***. Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat

masyarakat Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Visi Pembangunan Kota Yogyakarta tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam rangka menjadikan **“Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”**.

“Kota Pendidikan Berkualitas” adalah ;

- a. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara;
- b. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi;
- c. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia Quotient), emosional (Emotional Quotient) dan spriritual (Spiritual Quotient);
- d. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- f. Menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif.

“Pariwisata Berbasis Budaya” adalah :

- a. Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain ;
- c. Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara;
- d. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi -inovasi yang tetap berdasarkan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konversi dan wisata belanja;
- e. Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat.

“Pusat Pelayanan Jasa” adalah:

- a. Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri;

- b. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Jawa bagian selatan;
- c. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif;
- d. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah.

“Berwawasan Lingkungan” adalah:

Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan;

- a. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius; sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan;
- b. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan sebagai berikut;

- a. **Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan** yaitu dengan mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta mempunyai standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara, mempunyai keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi, kompetensi tinggi, menekan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan Kota Yogyakarta; menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul, membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. **Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata Kota Budaya dan kota Perjuangan** yaitu dengan meningkatkan obyek dan daya tarik wisata; menampilkan landmark (tetenger/ciri monumental) dan budaya khas Kota Yogyakarta serta nilai-nilai luhur budaya bangsa; membangun sarana dan prasarana wisata yang memadai; menciptakan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dunia pariwisata kota; meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat kota dalam pengembangan pariwisata; melakukan promosi dan pemasaran wisata yang efektif, sehingga menjadi salah satu tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.
- c. **Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa** melalui peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dengan memperkuat perekonomian kota berbasis keunggulan masing-masing sektor andalan menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan

khususnya dalam pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat kota terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan kesempatan yang sama dalam berusaha serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing sehingga dapat menjadi pusat pelayanan jasa di wilayah Jawa bagian Selatan.

- d. **Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan** dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
- e. **Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya** melalui peningkatan integritas setiap pribadi masyarakat kota, memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; patuh dan taat aturan hukum; memelihara kerukunan serta toleransi masyarakat dan antar umat beragama; mengembangkan semangat kekeluargaan; menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama; melaksanakan interaksi antar budaya; mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan; menerapkan nilai-nilai luhur Kota Yogyakarta; dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kota Yogyakarta dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan kota.
- f. **Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum** dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat kota; melakukan pembenahan

struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan gender dan memihak pada rakyat kecil.

- g. **Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai** melalui penciptaan kondisi yang kondusif, pemeliharaan dan penjaminan situasi yang aman , tertib, nyaman dan damai dengan memanfaatkan semua komponen masyarakat , pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat , mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun stabilitas keamanan dan penciptaan ketertiban kota;
- h. **Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas** melalui pembangunan infrastruktur yang maju dengan meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; peningkatan daya dukung kapasitas kota dengan pengembangan dan pemanfaatan aset-aset daerah, sarana dan prasarana kota serta fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat;
- i. **Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat** melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik; kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat kota yang mantap; penyediaan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan mempunyai kompetensi yang tinggi serta didukung oleh partisipasi masyarakat.

Sementara itu visi Pembangunan Kota Yogyakarta 2017 – 2022 adalah ***“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”***

Adapun misi Pembangunan Kota Yogyakarta 2017 – 2022 adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Berdasarkan telaah di atas, maka terdapat persoalan yang cukup mendasar di Kantor Kesatuan Bangsa yang dijabarkan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	Kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa yang sangat minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak optimalnya kelembagaan yang ada dikarenakan belum adanya PP yang khusus mengatur tentang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sehingga saat ini kondisi kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa tidak sesuai antara Perda dan Perwal yang mengatur dengan kondisi eksisting saat ini yang hanya terdiri dari 1 kepala, 1 sub bagian tata usaha dan 1 seksi 2. Sumber daya manusia yang ada belum memenuhi semua kebutuhan 3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah. 2. Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta. 3. Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Kantor Kesatuan Bangsa untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal. 4. Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah

			mendukung pelaksanaan kegiatan di OPD 4. Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal 5. Data yang ada kurang lengkap	Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 5. Adanya sarana dan prasarana
--	--	--	--	--

3.3 Telaahan Renstra K/L/dan Renstra DIY

Berdasarkan telaah Rencana Strategis yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2015 – 2019, maka ditemuilah keterkaitan antara permasalahan Perangkat Daerah (PD) dengan ketercapaian sasaran sesuai dengan Renstra tersebut, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan PD Terkait Dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;	Heterogenitas masyarakat Kota Yogyakarta	1. Adanya potensi terjadinya konflik.	1. Stabilitas daerah yang cukup kondusif.
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka		2. Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi.	2. Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi 3. Meningkatnya sarana dan

	mewujudkan demokrasi yang berkualitas.		3. Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada	prasarana yang ada di masyarakat 4. Ketersediaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dengan swadana 5. Tersedianya pedoman untuk acuan
--	--	--	--	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;

- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan

cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan,

keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan

akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan Takan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air

sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi kesadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar

Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 2012 – 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta naik dari 90,62% menjadi 93,30%. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 – 2014 menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila dibandingkan tahun 2011 dengan persentase 13,11%.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah angka rerata nasional.

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di daerah, maka keluaran (ouput) kegiatan yang dihasilkan adalah dokumen kegiatan kesatuan bangsa. Dokumen kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkesinambungan & berkelanjutan dari tahap penentuan alternatif rencana kegiatan sampai dengan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan.

Perencanaan yang disusun mendasarkan pada kondisi umum yang ada saat ini, yang akan diperbaiki melalui program kegiatan pembangunan. Kondisi umum daerah Kota Yogyakarta saat ini secara makro adalah sebagai bahwa Kota Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia mini, dimana penduduknya terdapat warga masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, disamping itu Kota Yogyakarta merupakan kota pendidikan, pariwisata dan perjuangan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga di luar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk datang di Yogyakarta, khususnya para remaja putra dan putri untuk menuntut ilmu.

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya persoalan klasik yaitu bertambahnya penduduk khususnya di kalangan remaja kesemuanya itu memerlukan perhatian kita bersama serta pemahaman yang mendalam terhadap keberadaan masing-masing baik masyarakat Yogyakarta maupun warga pendatang, sehingga akan timbul kebersamaan saling menghargai terhadap adat istiadat maupun budaya masing-masing.

Sebagai warga Kota Yogyakarta tentunya cukup bersyukur karena Yogyakarta tetap kondusif dan tidak terpengaruh terhadap setiap perubahan. Kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak menghendaki suasana tenteram, damai untuk mengubah kearah kondisi yang tidak aman bahkan munculnya konflik. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan menurunnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial dari tahun ke tahun.

Adapun Kondisi umum daerah secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan kedepan pada akhir RPJM yaitu tahun 2022 adalah meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta. Salah satu arah kebijakan pembangunan adalah meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan membangun bangsa dan watak bangsa (*nation and character building*) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur, maka diperlukan ***peningkatan pemahaman tentang rasa, jiwa dan semangat kebangsaan sesuai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sehingga diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang rukun, damai, demokratis, berkeadilan, sejahtera, maju dan memiliki moral dan etika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana kesemuanya itu dapat menekan terjadinya konflik sosial baik horisontal maupun vertikal di Kota Yogyakarta.***

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 dalam upaya menuju tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa Tahun 2017-2022 sebagaimana tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kondusifitas daerah	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian konflik sosial	70%	72%	76%	77%	80%	82%

Keberadaan Kantor Kesatuan Bangsa adalah untuk menjaga kondusifitas Kota Yogyakarta. Posisi strategis Kota Yogyakarta yang merupakan kota pelajar, kota budaya dan kota wisata menjadikannya sebagai kota yang sangat heterogen menjadikan Kota Yogyakarta harus memiliki strategi yang khusus untuk mensiasati potensi konflik yang mungkin terjadi. Menurunnya konflik sosial akan mengakibatkan kondusifitas daerah yang terjaga.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan berpijak pada Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2017 sampai dengan 2022. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan			
Misi 3 : Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kondusifitas daerah	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Peningkatan wawasan kebangsaan	1. Meningkatkan edukasi pancasila dan cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat 2. Meningkatkan publikasi pesan moral kepada masyarakat

			<p>3. Mengoptimalkan peran lembaga, organisasi sosial yang bergerak dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum di kota Yogyakarta</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial</p> <p>5. Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik</p> <p>6. Meningkatkan organisasi ber-SKT</p>
--	--	--	--

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang diakomodir dalam Renstra Perangkat Daerah (PD) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta berjumlah 5 (lima) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan (di tahun 2017) sementara untuk tahun selanjutnya akan berjumlah 8 (delapan) kegiatan. Dari 5 (lima) Program tersebut diperinci menjadi Kegiatan-kegiatan yang secara keseluruhan berjumlah 8 atau 6 Kegiatan. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa

No	Program / Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran
1.1.	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.2.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan perlengkapan Kantor
1.3.	Penyediaan Jasa pengelola Pelayanan Keuangan
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
2.1.	Penyediaan Jasa pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1.	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Laporan Kinerja OPD
5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
5.1.	Kegiatan Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
5.2.	Pemantaapan Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan*)
5.3.	Pemantapan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Ekonomi*)

*) Pada tahun 2018 ditiadakan

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya kondusifitas daerah	Penyelesaian konflik di masyarakat meningkat		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100%	100%	331.522.342	100%	631.216.662	100%	650.153.114	100%	669.657.685	100%	689.747.313	100%	710.439.801	100%	3.683.735.9217	Kantor Kesbang	Kota Yogyakarta
			Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik			113.690.000		389.286.000		400.964.514		412.993.385		425.383.013		438.143.601		2.180.460.513	Kantor Kesbang	Kota Yogyakarta
			1. Makan minum yang tersedia untuk : a. Koordinasi b. Tamu 2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		48 kali 24 kali 15 dkm	48 kali 24 kali 15 dkm			48 kali 25 kali 17 dkm	48 kali 26 kali 18 dkm			48 kali 27 kali 19 dkm	48 kali 28 kali 19 dkm			48 kali 29 kali 20 dkm	48 kali 29 kali 20 dkm			
			Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan	Terwujudnya pelayanan administrasi			159.753.670		217.276.515		223.794.800		230.508.700		237.424.000		244.546.700		1.3.3.304.385	Kantor Kesbang	Kota Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Kantor	perkantoran dengan baik																		
			1. Materi 6000 yang tersedia		75 lembar	75 lembar		75 lembar		75 lembar		75 lembar		75 lembar		75 lembar		75 lembar		75 lembar		
			2. Materi 3000 yang tersedia		250 lembar	250 lembar		250 lembar		250 lembar		250 lembar		250 lembar		250 lembar		250 lembar		250 lembar		
			3. STNK roda 4 yang terbayar		2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		
			4. STNK roda 2 yang terbayar		2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		
			5. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		10 jenis	10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		
			6. Jasa kebersihan kantor		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		
			7. Alat tulis kantor yang tersedia		53 jenis	53 jenis		54 jenis		54 jenis		55 jenis		55 jenis		55 jenis		55 jenis		55 jenis		
			8. Jasa percetakan		1 jenis	1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		
			9. Jasa penggandaan		135.000 lembar	135.000 lembar		150.000 lembar		160.000 lembar		170.000 lembar		180.000 lembar		190.000 lembar		190.000 lembar		190.000 lembar		
			10. Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia		7 jenis	7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		
			11. Komponen printer yang		8 jenis	8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			tersedia		2 jenis	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis			
			12. Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia		10 jenis	10 jenis		11 jenis		12 jenis		13 jenis		14 jenis		15 jenis		15 jenis			
			13. peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		5 jenis	5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis			
			14. Peraturan perundang-undangan yang tersedia		12 jenis	12 jenis		13 jenis		14 jenis		15 jenis		16 jenis		17 jenis		17 jenis			
			15. Jasa pemeliharaan peralatan kerja		5 jenis	5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis			
			16. Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia																		
			Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terwujudnya administrasi keuanagn			58.078.672		24.654.147		25.393.800		26.155.600		26.940.300		27.748.500		188.971.019	Kantor Kesbang	Kota Yogyakarta
			1. Dokumen administrasi penatausaha keuangan		5 jenis	5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			(SPP, SPM, SPJ dan Laporan akuntansi yang tersusun 3. Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola 4. Jasa tenaga bantuan		15 dkm 1 orang	15 dkm 1 orang		15 dkm 1 orang		15 dkm 1 orang		15 dkm 1 orang		15 dkm 1 orang		15 dkm 1 orang		15 dkm 1 orang			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	62.585.000	100%	64.138.400	100%	66.062.600	100%	68.044.500	100%	70.085.900	100%	72.188.500	100%	403.104.900	Kantor Kesbang	Kota Yogyakarta
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor • Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 unit gedung / kantor	1 unit gedung / kantor	25.000.000	1 unit gedung / kantor	15.000.000	1 unit gedung / kantor	15.450.000	1 unit gedung / kantor	15.913.500	1 unit gedung / kantor	16.391.000	1 unit gedung / kantor	16.882.700	1 unit gedung / kantor	104.637.200	Kantor Kesbang	Kota Yogyakarta
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ops • Jasa pemeliharaan rutin / berkala	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai			37.585.000		49.138.400		50.612.600		52.131.000		53.694.900		55.305.800		298.467.700	Kantor Kesbang	Kota Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			kendaraan dinas / operasional a. Roda 4 b. Roda 2		2 unit 2 unit	2 unit 2 unit		2 unit 3 unit		2 unit 4 unit		2 unit 4 unit		2 unit 4 unit		2 unit 4 unit		2 unit 4 unit			
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	8.000.000	100%	6.000.000	100%	6.180.000	100%	6.365.400	100%	6.556.400	100%	6.754.000	100%	39.855.800	Kantor Kesbang	Kota Yogyakarta
			Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur • Diklat Formal dan Non Formal	SDM Aparatur meningkat			8.000.000		6.000.000		6.180.000		6.365.400		6.556.400		6.754.000		39.855.800	Kantor Kesbang	Kota Yogyakarta
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	12.650.000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	12.650.000	Kantor Kesbang	Kota Yogyakarta
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi laporan keuangan SKPD 1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja,	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat			12.650.000		0		0		0		0		0		12.650.000	Kantor Kesbang	Kota Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			PK, RKA, DPA) 2. Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)		5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen				
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase organisasi ber-SKT yang aktif	79%	79%	697.344.664	79%	1.305.170.277	80%	1.344.325.385	82%	1.384.655.147	84%	1.426.194.801	85%	1.468.980.646	85%	7.628.670.920	Kantor Kesbang	Kota Yogyakarta	
			Pemantapan Ideologi & Kewaspadaan Nasional 1. Sosialisasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat 2. Peringatan Serangan Umum 1 Maret 3. Koordinasi komunitas intelejen daerah (kominda0 Kota Yogyakarta	1. Frekuensi sosialisasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi pelajar & masyarakat 2. Peringatan Serangan Umum 1 Maret 3. Frekuensi Koordinasi komunitas intelejen daerah (kominda0	10 kali 1 kali 24 kali	10 kali 1 kali 24 kali	697.344.664	11 kali 1 kali 24 kali	1.305.170.277	12 kali 3 kali 24 kali	1.344.325.385	13 kali 3 kali 24 kali	1.384.655.147	14 kali 3 kali 24 kali	1.426.194.801	15 kali 3 kali 24 kali	1.468.980.646	15 kali 3 kali 24 kali	1.344.534.135			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Kota Yogyakarta																		
			4. Koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	4. Frekuensi Koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	7 kali	7 kali		7 kali		7 kali		7 kali		7 kali		7 kali		7 kali				
			5. Koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta	5. Frekuensi Koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta	4 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali				
			6. Koordinasi Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah	6. Frekuensi Koordinasi Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali				
			7. Pendidikan dan Fasilitasi Politik Bagi Masyarakat dan Partai Politik	7. Frekuensi Pendidikan dan Fasilitasi Politik Bagi Masyarakat dan Partai Politik	10 kali	10 kali		11 kali		12 kali		13 kali		14 kali		15 kali		15 kali				
			8. Pengawasan	8. Frekuensi	4 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Orang Asing (PORA)	Pengawasan Orang Asing (PORA)																	
			9. Penguatan organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta	9. Penguatan organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta	13 kali	13 kali		13 kali		14 kali		14 kali		14 kali		15 kali		15 kali			
			10. Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota Yogyakarta	10. Frekuensi Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali			
			11. Koordinasi Antar Forum yang Ada Di Kota Yogyakarta	11. Frekuensi Koordinasi Antar Forum yang Ada Di Kota Yogyakarta	18 kali	18 kali		18 kali		18 kali		18 kali		18 kali		18 kali		18 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	& masyarakat 2. Peringatan Serangan Umum 1 Maret	10 kali	1.194.601.164		11 kali	1.304.000.000	12 kali	1.434.400.000	13 kali	1.577.840.000	14 kali	1.735.624.000	15 kali	1.909.186.400	15 kali	2.100.000.00	Kantor Kesbang	Kota Yogyakarta
			1. Sosialisasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	1. Frekuensi Koordinasi komunitas intelegen daerah (kominda0 Kota Yogyakarta	10 kali			11 kali		12 kali		13 kali		14 kali		15 kali		15 kali			
			2. Peringatan Serangan Umum 1 Maret	2. Frekuensi Koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	1 kali			1 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali			
			1. Koordinasi komunitas intelegen daerah (kominda0 Kota Yogyakarta	3. Frekuensi Koordinasi tim terpadu penangan konflik sosial di Kota Yogyakarta	24 kali			24 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali			
			2. Koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	4. Frekuensi Koordinasi	7 kali			24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali		24 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penang-gung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			3. Koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta	Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Yogyakarta	4 kali	4 kali		7 kali		7 kali		7 kali		7 kali		7 kali		7 kali					
			4. Koordinasi Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Yogyakarta	5. Frekuensi Pendidikan dan Fasilitasi Politik Bagi Masyarakat dan Partai Politik	2 kali	2 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali					
			5. Pendidikan dan Fasilitasi Politik Bagi Masyarakat dan Partai Politik	6. Frekuensi Pengawasan Orang Asing (PORA)	10 kali	10 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		3 kali					
			6. Pengawasan Orang Asing (PORA)	7. Penguatan organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta	4 kali	4 kali		11 kali		12 kali		13 kali		14 kali		14 kali		24 kali					
				8. Frekuensi Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan	13 kali	13 kali												7 kali					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			7. Penguatan organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta	pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali			
			8. Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota Yogyakarta	9. Koordinasi Antar Forum yang Ada Di Kota Yogyakarta				13 kali		14 kali		14 kali		15 kali		15 kali		15 kali			
							1 kali		1 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		
					18 kali	18 kali															
								18 kali		18 kali		18 kali		18 kali		18 kali		18 kali			
															3 kali						
															24 kali						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
																7 kali						
																4 kali						

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Kantr Kesatuan Bangsa di Kota Yogyakarta sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penyelesaian konflik sosial	70%	70%	72%	76%	77%	80%	82%	82%

Indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa ini mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan program Pengembangan Wawasan kebangsaan yang dijabarkan dalam kegiatan Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 adalah dokumen dan bagian dari rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD

Demikian Renstra Perangkat Daerah ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Kepala Perangkat Daerah beserta staf Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dan diketahui pula oleh stakeholder.